

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

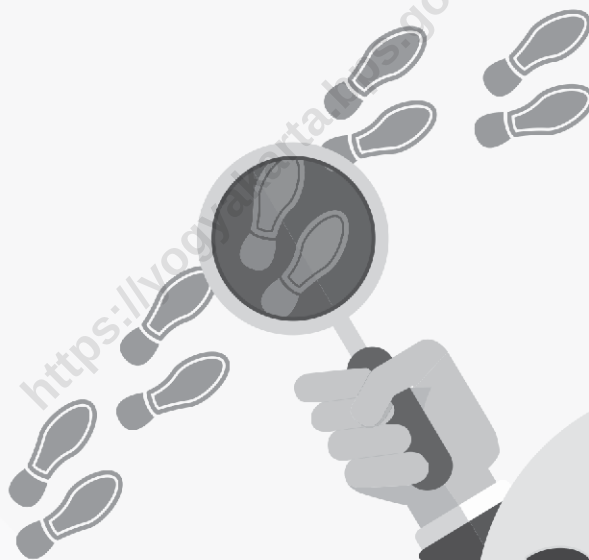
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

2021



STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



2021

Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

Political and Security Statistics of Daerah Istimewa Yogyakarta 2021

ISSN : 2460-3139

No. Publikasi/Publication Number: 34000.2235

Katalog/Catalog: 4601001.34

Ukuran Buku/Book Size: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman/Number of Pages: xiv + 72 halaman/pages

Naskah/Manuscript:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Penyunting/Editor:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Desain Kover oleh/Cover Designed by:

BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Ilustrasi Kover/Cover Illustration:

Penerbit/Published by:

© BPS Provinsi DI Yogyakarta/BPS-Statistics DI Yogyakarta Province

Pencetak/Printed by:

Badan Pusat Statistik

Sumber Ilustrasi/Graphics by: -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part of all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia

TIM PENYUSUN BUKU

**STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2022**

Penanggung Jawab : Sugeng Arianto, M.Si

Editor : Soman Wisnu Darma, S.Si, MT
Jafar Nawawi, S.Si, M.Si

Naskah : Agung Wibowo, M.IDEC

Pengolah Data : Agung Wibowo, M.IDEC

KATA PENGANTAR

Wabah Covid-19 yang menahun masih mewarnai dinamika politik, keamanan, dan praktek demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data dan informasi mengenai hal tersebut disajikan secara lengkap dan komprehensif dalam Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022.

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini berasal dari survei yang dilakukan oleh BPS dan kompilasi produk administrasi. Data hasil kompilasi berasal dari beberapa instansi, antara lain dari Kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Sekretariat DPRD se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Penerbitan publikasi ini merupakan upaya BPS dalam merespon dan memenuhi kebutuhan pengguna data yang semakin bervariasi.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pengumpulan data dan penyusunan publikasi ini, disampaikan terima kasih. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengguna data.

Yogyakarta, November 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sugeng Arianto, M.Si

ABSTRAKSI

Wabah Covid-19 yang meluas dan menahun membawa dampak pada hampir setiap aspek kehidupan. Penanganan wabah Covid-19 di beberapa negara mendorong pemerintahnya untuk melakukan upaya-upaya luar biasa dengan kewenangan tanpa batas yang jelas. Di tengah minimnya akuntabilitas, kewenangan tanpa batas jelas bagi pemerintah dalam mengatasi krisis dan kedaruratan menyebabkan membesarnya kekuasaan negara secara eksekutif (Susanto, 2021). Pada akhirnya, hal ini dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Jumlah personil polisi di D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio polisi per penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:694. Tingginya angka rasio ini menunjukkan bahwa beban tugas polisi di Kabupaten Gunungkidul cukup besar.

Keberadaan pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 134 kalurahan yang mempunyai pos polisi atau sekitar 30,60 persen. Terdapat peningkatan jumlah kalurahan yang memiliki pos polisi jika dibandingkan dengan tahun 2018 (114 kalurahan). Berdasarkan data Podes 2021, Gunungkidul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kalurahan terbanyak yang memiliki pos polisi.

Dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, baik Polres/polresta maupun Mapolda, sebanyak 69,18 persen kasus dapat terselesaikan. Angka penyelesaian kasus atau *clearance rate* pada tahun 2021 ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tingkat penyelesaian tindak kejahatan sebesar 76,41 persen. Namun, tingkat penyelesaian tindak kejahatan ini masih menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 68,80 persen.

Pada tahun 2021, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) terendah terdapat di Sleman. Di kabupaten ini, selang waktu tindak kejahatan adalah 6 jam 22 menit 32 detik. Secara rata-rata, setiap 6 jam terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru di kabuapten ini. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 dimana selang waktu kejahatan adalah 6 jam 09 menit 6 detik.

Pada tahun 2021, angka kejahatan di D.I. Yogyakarta adalah 189, artinya terjadi sebanyak 189 kejahatan per 100.000 penduduk. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa untuk setiap 100.000 penduduk di D.I. Yogyakarta terdapat sebanyak 189 penduduk yang berisiko menjadi korban tindak kejahatan. Menurut kabupaten/kota, pada tahun 2021, resiko penduduk terkena tindak kejahatan terbesar terdapat di Kota Yogyakarta (184 kejadian kejahatan per 100.000 penduduk), sedangkan Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan resiko menjadi korban tindak kejahatan terendah yaitu sebesar 27 orang per 100.000 penduduk. Dengan demikian, Gunungkidul merupakan daerah yang paling aman dari resiko tindak kejahatan di wilayah D.I. Yogyakarta.

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Gambar 4.2 memberikan informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi selama periode 2017 - 2021. Pada tahun 2021, DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta menghasilkan 72 keputusan DPRD dan 112 keputusan pimpinan Dewan. Selain itu, pada tahun yang sama jumlah peraturan daerah (perda) yang sudah disahkan oleh DPRD D.I. Yogyakarta sebanyak 11 perda. Dari 11 perda yang disahkan tersebut, sebanyak 4 perda diantaranya merupakan perda insiatif dari DPRD D.I. Yogyakarta.

Pada tanggal 21 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman menggelar rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sleman hasil pemilu kepala daerah (Pemilukada) 2020. Dalam rapat pleno tersebut ditetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 yakni Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa.

Sementara itu, pada tanggal 22 Januari 2021, KPUD Bantul menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 adalah pasangan nomor urut 1 yakni Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo. Pada tanggal yang sama KPUD Gunungkidul menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul di Pilkada 2020 terpilih yakni Sunaryanta-Heri Susanto.

Pada tahun 2021, dengan menggunakan metode baru, angka IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 81,21. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja demokrasi di D.I. Yogyakarta berada dalam kategori “baik”. Dengan demikian, secara umum sistem dan institusi demokrasi di wilayah ini telah berfungsi dengan baik. Capaian ini juga menempatkan D.I. Yogyakarta pada peringkat ketiga capaian IDI dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia pada tahun 2021.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	v
Abstraksi.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan.....	6
1.3 Ruang Lingkup.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
Bab II Metodologi	
2.1 Jenis dan Sumber Data.....	11
2.2 Konsep dan Definisi.....	11
2.3 Penjelasan Teknis.....	15
Bab III Gambaran Umum Keamanan di D.I. Yogyakarta	
3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah.....	19
3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta.....	21
3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta.....	24
3.4 Korban Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan.....	26
Bab IV Gambaran Umum Politik D.I. Yogyakarta	
4.1 Pemilu 2019.....	31
4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	33
4.3 Pemilihan Kepala Daerah.....	34
4.4 Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	36
Tabel-tabel	43

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Rasio Polisi per Penduduk di D.I.Yogyakarta, 2021.....	20
Gambar 3.2 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) di D.I. Yogyakarta, 2019-2021	23
Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta Tahun, 2021.....	25
Gambar 4.1 Persentase Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu DPRD Provinsi 2019 Menurut Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	32
Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2021.....	34
Gambar 4.3 Nilai Aspek IDI Metode Baru Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021.....	39

DAFTAR TABEL

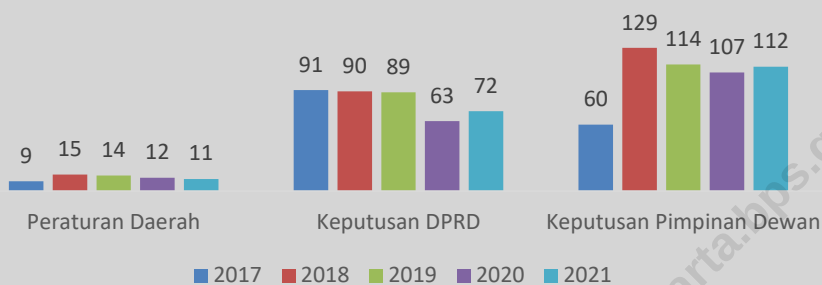
	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021.....	43
Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021	44
Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Polisi per Penduduk di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021.....	45
Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi dan Pos Kamling di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021.....	46
Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021	47
Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (<i>Crime Total</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019-2021.....	48
Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (<i>Crime Cleared</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019-2021.....	49
Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019-2021.....	50
Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (<i>Crime Clock</i>) Menurut kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019-2021 (jam)	51
Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (<i>Crime Rate</i>) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019-2021.....	52
Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021.....	53
Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021.....	54
Tabel 13. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021	55
Tabel 14. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021.....	56

Tabel 15.	Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021.....	57
Tabel 16.	Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta 2020 – 2021*.....	58
Tabel 17.	Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021.....	59
Tabel 18.	Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2020.....	60
Tabel 19.	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) D.I. Yogyakarta, 2021.....	61
Tabel 20.	Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021	62
Tabel 21.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021	63
Tabel 22.	Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021.....	64
Tabel 23.	Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta	64
Tabel 24.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta	65
Tabel 25.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	65
Tabel 26.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019 untuk DPD di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	66
Tabel 27.	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah Menurut Kabupaten Kota dalam Pemilu 2019 untuk Pemilihan Presiden di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	66
Tabel 28.	Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, 2019 - 2021	67
Tabel 29.	Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016 - 2020 (dalam rupiah)	68

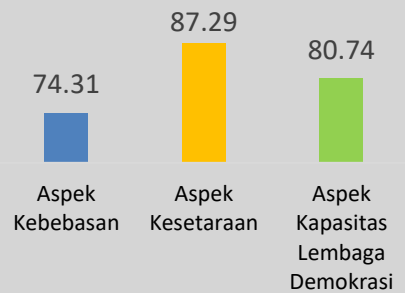
Tabel 30.	Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016–2020.....	68
Tabel 31	Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta	69
Tabel 32	Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	69
Tabel 33	Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/kota di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	70
Tabel 34	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia, dan Jabatan Sebelumnya di Provinsi D.I. Yogyakarta	70
Tabel 35	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) D.I. Yogyakarta (Metode Baru, 2021.....	71

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN D.I. YOGYAKARTA 2022

Produk Hukum DPRD D.I.Yogyakarta 2017 - 2021



IDI D.I. Yogyakarta, 2021



**Crime Clock 1 Jam 15 menit
06 detik**



Crime clearance rate 69,18

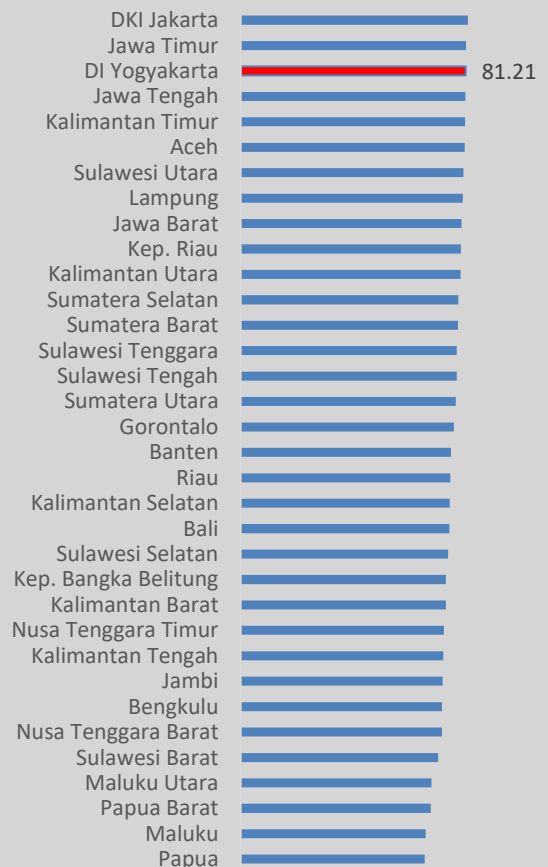


Crime rate 189



**Rasio Polisi : Penduduk
= 1 : 383**

IDI Metode Baru, 2021



<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Wabah Covid-19 yang meluas dan menahun membawa dampak pada hampir setiap aspek kehidupan. Meskipun vaksin sudah dikembangkan, tetapi virus bermutasi dengan pesat. Bahkan pada pertengahan 2021, terjadi lonjakan penderita Covid-19 yang disebabkan oleh penularan varian baru virus Corona B.1.617.2 atau Varian Delta. Dimana mayoritas kematian penderita Covid disebabkan oleh varian ini.

Penanganan wabah Covid-19 di beberapa negara mendorong pemerintahnya untuk melakukan upaya-upaya luar biasa dengan kewenangan tanpa batas yang jelas. Di tengah minimnya akuntabilitas, kewenangan tanpa batas jelas bagi pemerintah dalam mengatasi krisis dan kedaruratan menyebabkan membesarnya kekuasaan negara secara eksekutif (Susanto, 2021). Pada akhirnya, hal ini dapat mengancam kehidupan demokrasi.

Dalam laporannya pada tahun 2018, Freedom House menyampaikan bahwa dalam rentang waktu antara 2005 dan 2018, jumlah negara-negara tidak bebas meningkat menjadi 26 persen, sedangkan pangsa negara-negara bebas berkurang menjadi 44 persen. Pilar, prinsip, dan nilai demokrasi juga sedang mengalami hambatan di negara-negara yang sebelumnya dikenal sebagai pilar demokrasi. Nampaknya, pada kurun waktu dua tahun terakhir, pandemi menjadi sumber tekanan baru demokrasi.

Namun demikian, beberapa negara juga sukses mengimplementasikan nilai demokrasi dalam penanganan pandemi. Seperti Jerman, Norwegia, Finlandia, Taiwan, dan Korea Selatan. Negara-negara tersebut memperhatikan kebutuhan masyarakat dan berdiskusi dengan ilmuwan serta komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah dan masyarakat berusaha mencari solusi yang dapat dilakukan bersama (LIPI, 2021).

Selain berdampak terhadap dinamika politik, wabah Covid-19 juga berpengaruh terhadap kondisi dan situasi keamanan di wilayah D.I. Yogyakarta. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 akan mempengaruhi tingkat kejahatan yang terjadi. Pada satu sisi, dengan mobilitas dan aktivitas masyarakat yang dibatasi maka angka kejahatan diduga akan menurun. Namun pada sisi lain, tekanan

ekonomi yang diakibatkan rendahnya aktivitas ekonomi selama masa pandemi juga berpotensi terhadap meningkatnya angka kriminalitas.

Sejauh ini, angka kriminalitas (*crime total*) merupakan salah satu informasi yang digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang mengindikasikan bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Sejalan dengan itu, upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengemban tugas mulia menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas meskipun dalam masa pembatasan. Namun demikian, upaya mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2022 ini menyajikan berbagai informasi terkait fenomena politik dan keamanan selama tahun 2021. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah sebagai bahan untuk evaluasi, perencanaan, dan monitoring terhadap situasi politik dan keamanan khususnya di D.I. Yogyakarta.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi keamanan serta politik di masyarakat.

Adapun tujuannya adalah untuk menyajikan informasi secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, dinamika politik dan demokrasi, serta partisipasi semua elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas keamanan dan pembangunan politik di D.I. Yogyakarta.

1.3.Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan Daerah Istimewa Yogyakarta 2022 menyajikan informasi mengenai gambaran keamanan dan situasi politik di Daerah Istimewa Yogyakarta (D.I. Yogyakarta). Publikasi ini menyajikan data dan informasi

dalam lingkup provinsi. Namun demikian beberapa data statistik disajikan sampai dengan tingkat kabupaten/kota secara berkala.

1.4. Sistematika Penyajian

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam empat bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi. Bab II menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penyusunan publikasi ini, meliputi jenis dan sumber data, konsep/definisi, dan penjelasan teknis tentang statistik/indikator yang disajikan. Bab III menyajikan gambaran umum keamanan di D.I. Yogyakarta. Bab IV menyajikan gambaran umum politik di D.I. Yogyakarta.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Pengumpulan data dengan melakukan kompilasi hasil registrasi/catatan. Data yang bersumber dari BPS antara lain Potensi Desa (Podes) 2018, Podes 2021, Survei Statistik Politik dan Keamanan 2022, dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) metode baru tahun 2021. Sedangkan data dari dinas/instansi terkait, antara lain berasal dari Kepolisian (Polres/Polresta/Polda), Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Kesbangpol, Sekretariat Dewan DPRD DIY, Badan Kepegawaian Daerah, dan DPPKA Pemerintah Daerah D.I.Yogyakarta.

2.2 Konsep dan Definisi

A. Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa di mana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian adalah:
 - a. Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - b. Dalam hal delik aduan, pengaduan yang dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - c. Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichtmatigheid*.
 - d. Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian.
 - e. Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - f. Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- a. Orang yang melakukan kejahatan.
- b. Orang yang turut melakukan kejahatan.
- c. Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- d. Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- e. Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Kejahatan Konvensional (*Common Law Crime*)

Kejahatan konvensional (*Common Law Crime*) adalah kejahatan yang dianggap oleh semua orang sebagai kejahatan misalnya pembunuhan, perkosaan, perampokan, dan penyerangan. Pelaku menggunakannya sebagai *Part Time Career* dan seringkali untuk menambah penghasilan dari kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan sukses ekonomi, akan tetapi dalam hal ini terdapat reaksi dari masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

D. Kejahatan Transnasional

Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang tidak hanya bersifat lintas batas negara, tetapi termasuk juga kejahatan yang dilakukan di suatu negara, tetapi berakibat fatal bagi negara lain. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan apabila terdapat piranti hukum yang dilanggar sehingga bisa saja terjadi suatu perbuatan yang dirumuskan, dirancang, disiapkan, dilaksanakan dalam suatu negara bisa saja bukan merupakan kejahatan namun ketika hasil kejahatan yang diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda.

E. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan (*Crime Total*) adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan, yaitu setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat “*dark number*”.

F. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)

Jumlah tindak kejahatan yang diselesaikan (*Crime Cleared*) merupakan statistik yang menggambarkan jumlah kasus penyelesaian tindak pidana oleh polisi yang terjadi pada kurun waktu tertentu.

G. Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)

Resiko penduduk terkena tindak kejahatan (*Crime Rate*) adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk berisiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk.

H. Pelaku Tindak Kriminalitas

Pelaku tindak kriminalitas adalah orang yang melakukan, turut/menyuruh melakukan, membujuk orang lain, dan membantu melakukan tindak kriminalitas. Klasifikasi pelaku tindak kriminalitas menurut umur (KUHP);

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

I. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan tidak melebihi 20 hari.

J. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

K. Korban Kejahatan

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

L. Konflik Massal dalam Podes

Konflik massal dalam Podes merujuk pada konflik berupa perkelahian massal yang terjadi dalam satu wilayah desa/kelurahan meliputi;

- Perkelahian antar kelompok warga adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.
- Perkelahian warga antar desa/kelurahan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga desa/kelurahan/nagari lainnya.
- Perkelahian warga dengan aparat keamanan adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.
- Perkelahian warga dengan aparat pemerintah adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.
- Perkelahian antar pelajar/mahasiswa adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.
- Perkelahian antar suku/etnis adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.
- Lainnya, antara lain perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar agama, perkelahian antar aparat keamanan, dan sebagainya.

M. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran, dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

N. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

O. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi penyalur keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

P. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 8/2012).

Q. Peserta Pemilu Legislatif

Peserta pemilu legislatif adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

2.3 Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah;

a. Angka Indeks Kejahatan (I_t)

$$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$$

dimana : t_0 = tahun dasar
 t = tahun t

b. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

c. Skala Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun } t} \times (\text{detik})$$

d. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearence*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\%)$$

e. Indeks Kejahatan (*crime index*)

$$\text{Indeks Kejahatan} = \frac{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t}{\text{Jumlah Tindak Pidana pada tahun } t_0} \times 100\%$$

BAB 3

GAMBARAN UMUM

KEAMANAN DI

D.I. YOGYAKARTA

GAMBARAN UMUM KEAMANAN DI D.I. YOGYAKARTA

3

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Selama Pandemi Covid-19, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) selain berperan sebagai aparat penegak hukum juga berpartisipasi dalam upaya pengendalian wabah yang telah berjangkit sejak tahun 2020. Polri dituntut untuk berperan aktif dalam upaya pengendalian penyakit, edukasi kepada masyarakat, dan penindakan tindak kejahatan. Selain itu, kepolisian juga terlibat dalam mengamankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945 kepada Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Di wilayah D.I. Yogyakarta, Polri memiliki kelengkapan prasarana keamanan yang terdiri dari 1 Mapolda, 5 Polres/Polresta, 80 polsek/polsekta dan 47 pos polisi. Untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan pengayoman masyarakat, pada tahun 2021, terdapat sebanyak 9.688 personil yang bertugas di seluruh wilayah D.I. Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau sebanyak 2.980 polisi bertugas di Mapolda D.I. Yogyakarta. Sementara itu, sebanyak 6.708 polisi lainnya bertugas di Polres/polresta di D.I. Yogyakarta. Adapun, jika dirinci menurut jenis kelaminnya, terdapat 6,42 persen polisi wanita atau sebanyak 622 orang dan 93,58 persen polisi laki-laki atau sebanyak 9.066 orang.

Jumlah personil polisi di D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah polisi yang ada juga masih belum memenuhi kondisi yang ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Masih tingginya rasio jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk mengakibatkan tingginya rata-rata beban tugas polisi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kondisi tersebut harus dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh terhadap peningkatan kriminalitas, berkurangnya pelayanan terhadap masyarakat, penyidikan kejahatan yang berlarut-larut, atau keterlambatan polisi dalam menangani tindak kejahatan.

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio polisi per penduduk terbesar terdapat di Kabupaten Gunungkidul yaitu 1:694. Tingginya angka rasio ini menunjukkan bahwa beban tugas polisi di Kabupaten Gunungkidul cukup besar. Hal ini harus menjadi perhatian

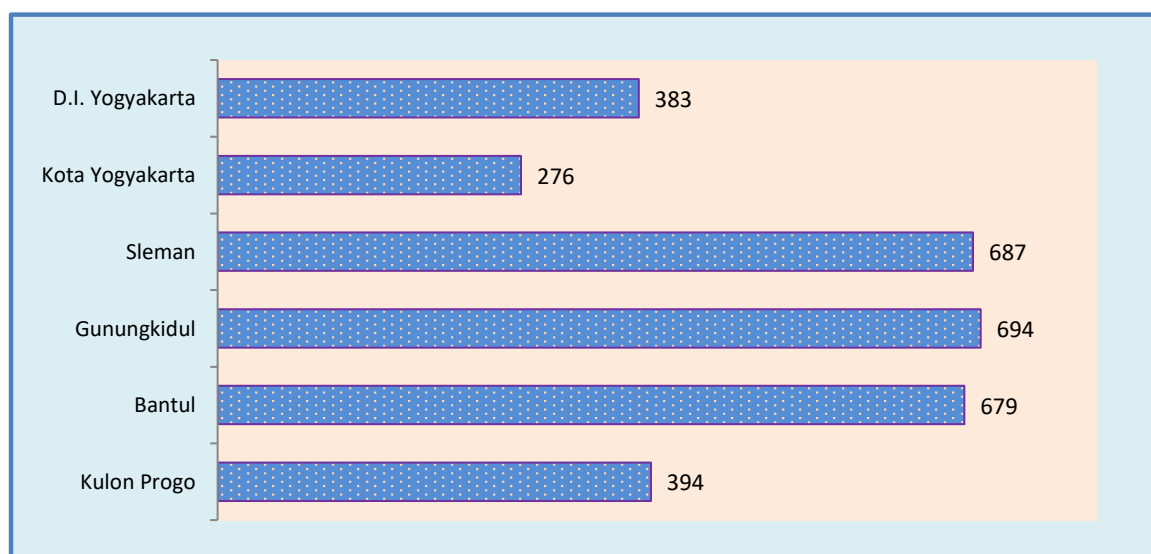
agar kualitas pelayanan polisi dan upaya polisi dalam menjaga keamanan di Gunungkidul dapat dilakukan dengan optimal. Terlebih lagi, Gunungkidul merupakan kabupaten yang terluas di wilayah D.I. Yogyakarta. Wilayah Gunungkidul meliputi 46,62 persen dari seluruh wilayah provinsi ini. Dengan besarnya rasio polisi per penduduk dan luasnya wilayah cakupan maka beban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di kabupaten ini menjadi relatif berat.

Kabupaten lain yang mempunyai rasio polisi penduduk relatif besar adalah Sleman (1:687) dan Bantul (1:679). Sementara itu, rasio polisi penduduk terkecil pada tahun 2021, berada di Kota Yogyakarta sebesar 1: 276.

Pada tahun 2021, rasio polisi per penduduk di wilayah D.I. Yogyakarta sebesar 1: 383, yang artinya bahwa secara rata-rata setiap 1 personil polisi menjaga keamanan dan ketertiban 383 orang penduduk. Sementara itu, pada tahun 2020 angka rasio ini sebesar 1: 376. Hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan beban tugas polisi dari tahun 2020 ke tahun 2021 dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.

Jika dibandingkan dengan rasio polisi per penduduk di kabupaten, terlihat bahwa rasio polisi per penduduk di tingkat provinsi terlihat lebih rendah. Rendahnya angka rasio penduduk polisi untuk wilayah D.I. Yogyakarta karena penghitungan rasio polisi penduduk di tingkat provinsi juga melibatkan aparat kepolisian yang bertugas di Mapolda D.I. Yogyakarta.

Gambar 3.1 Rasio Polisi per Penduduk di D.I. Yogyakarta, 2021



Sumber : Survei Polkam 2022, diolah

Keberadaan pos polisi dan poskamling merupakan salah satu prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan keamanan masyarakat. Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 134 kalurahan yang mempunyai pos polisi atau sekitar 30,60 persen. Terdapat peningkatan jumlah kalurahan yang memiliki pos polisi jika dibandingkan dengan tahun 2018 (114 kalurahan). Berdasarkan data Podes 2021, Gunungkidul tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kalurahan terbanyak yang memiliki pos polisi.

Selain keberadaan sarana pos polisi, banyaknya personil pertahanan sipil (hansip) di tiap kalurahan akan sangat membantu dalam menjaga stabilitas keamanan. Hansip merupakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Hasil Podes 2021 menunjukkan bahwa jumlah hansip yang ada di D.I. Yogyakarta sebanyak 23.394 orang dengan rasio hansip per kalurahan mencapai 1:53, artinya untuk setiap 1 kalurahan terdapat 53 orang hansip. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 dimana rasio hansip per desa mencapai 52 orang hansip di setiap desa, terlihat adanya peningkatan rasio. Kondisi ini juga mengindikasikan beban kerja hansip yang agak berkurang. Peningkatan rasio jumlah hansip per desa menunjukkan berkurangnya beban kerja hansip dan juga dapat mengurangi potensi gangguan keamanan di suatu wilayah.

Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, rasio hansip terhadap kalurahan paling kecil berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu 1:40. Hal tersebut berarti bahwa setiap 1 kalurahan secara rata-rata dilayani oleh 40 orang hansip. Sedangkan rasio hansip terhadap kalurahan paling besar berada di Kabupaten Bantul yaitu 1:70 artinya setiap kalurahan dilayani oleh sekitar 70 orang hansip.

3.2 Perkembangan Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Menurut Soesilo (1985), kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Adapun menurut sosiologis, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan atau tingkah laku yang tidak hanya merugikan pelaku namun juga memberikan kerugian bagi masyarakat sekitarnya berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian di D.I. Yogyakarta selama 3 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2019, terdapat

9.170 kasus kejahatan yang dilaporkan. Sementara itu, pada tahun 2020, tindak kejahatan yang dilaporkan tercatat sebanyak 8.551 kasus. Selanjutnya, pada tahun 2021, laporan terhadap tindak kejahatan tercatat sebanyak 6.999 kejadian. Penurunan jumlah laporan kejahatan ini menjadi kecenderungan dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini. Sebelumnya pada rentang waktu 2018 – 2019 juga telah terjadi trend penurunan tindak kejahatan yang dilaporkan (BPS DIY, 2021). Adapun trend penurunan tindak kejahatan pada kurun waktu 2019 – 2021 diduga terkait dengan pembatasan aktivitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penularan wabah Covid-19.

Namun demikian, jika dilihat menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa tingkat kejahatan di Bantul justru menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2020, jumlah kejahatan yang dilaporkan di Bantul meningkat menjadi 1.088 kasus dari sebelumnya 933 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021, laporan tindak kejahatan kembali meningkat menjadi 1.260 kasus.

Adapun jumlah kejadian tindak kejahatan di Gunungkidul dan Kota Yogyakarta menunjukkan trend yang berfluktuatif dalam periode 2019 - 2021. Namun jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 (sebelum wabah Covid-19), terlihat bahwa angka tindak kejahatan yang dilaporkan di kedua wilayah tersebut masih lebih rendah.

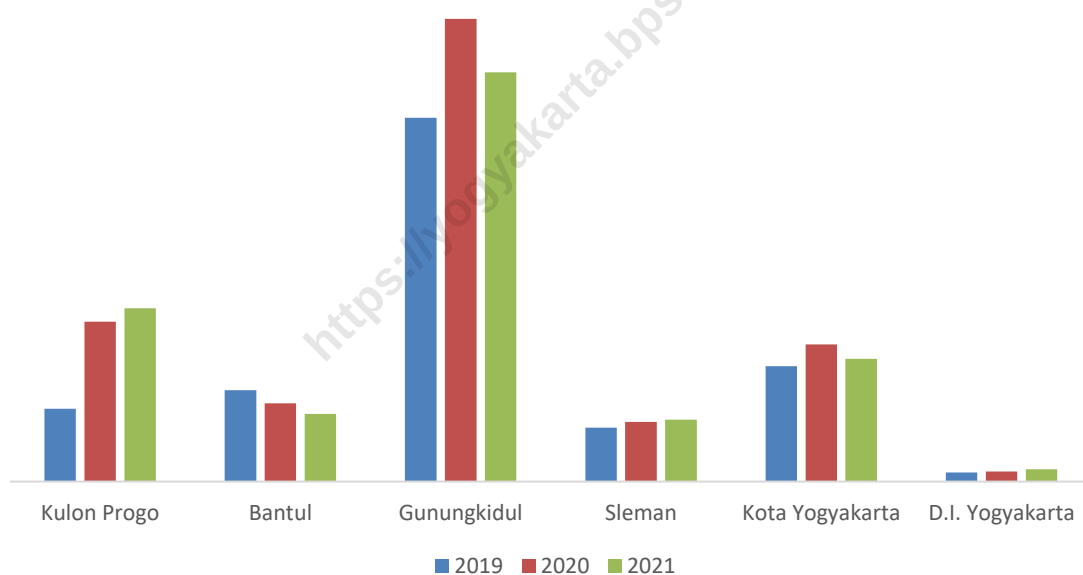
Sementara itu, jumlah kejahatan di Sleman meskipun mengalami penurunan, masih merupakan yang tertinggi di D.I. Yogyakarta. Pada tahun 2020, jumlah kejahatan di kabupaten ini tercatat sebanyak 1.424 kasus. Setahun kemudian, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan berkurang menjadi 1.374 kasus.

Dari keseluruhan tindak kejahatan yang dilaporkan ke pihak kepolisian, baik polres/polresta maupun Mapolda, sebanyak 69,18 persen kasus dapat terselesaikan. Angka penyelesaian kasus atau *clearance rate* pada tahun 2021 ini menunjukkan adanya penurunan jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya. Pada tahun 2020 tingkat penyelesaian tindak kejahatan sebesar 76,41 persen. Namun, tingkat penyelesaian tindak kejahatan ini masih menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yang besarnya 68,80 persen. Dengan demikian persentase penyelesaian tindak kejahatan (*clearance rate*) selama tiga tahun berturut-turut tersebut menunjukkan adanya fluktuasi meskipun dengan kecenderungan yang meningkat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja kepolisian dalam penyelesaian tindak kejahatan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian perlu sedikit kehati-hatian dalam menafsirkan angka *clearance rate* ini mengingat kejadian kejahatan yang diselesaikan termasuk juga kejadian kejahatan yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2021, persentase penyelesaian tindak kejahatan untuk setiap kabupaten/kota cukup bervariasi. Persentase penyelesaian tindak pidana tertinggi terdapat di Gunungkidul yang mencapai 87,02 persen. Adapun tingkat penyelesaian kejahatan yang terendah di D.I. Yogyakarta tercatat di Kepolisian Resort Sleman, dimana *clearance rate* di wilayah ini tercatat sebesar 62,45 persen.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dapat dilihat dari selang waktu kejahatan (*crime clock*). Selang waktu kejahatan adalah selang waktu atau interval waktu terjadinya satu tindak kejahatan dengan kejahatan yang lain. Semakin rendah nilainya menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di suatu wilayah semakin buruk karena mengindikasikan semakin sering terjadinya tindak kejahatan baru. Selang waktu terjadinya tindak kejahatan di D.I. Yogyakarta tersaji dalam Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) di D.I. Yogyakarta, 2019-2021



Sumber : Survei Statistik Polkam 2020 - 2022, diolah

Pada tahun 2021, selang waktu tindak kejahatan (*crime clock*) terendah terdapat di Sleman. Di kabupaten ini, selang waktu tindak kejahatan adalah 6 jam 22 menit 32 detik. Secara rata-rata, setiap 6 jam terjadi 1 kasus tindak kejahatan baru di kabupaten ini. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 dimana selang waktu kejahatan adalah 6 jam 09 menit 6 detik. Adapun pada tahun 2019, *crime clock* di Sleman adalah 5 jam 33 menit 43 detik. Semakin meningkatnya angka *crime clock* menunjukkan bahwa intensitas terjadinya tindak kejahatan di Sleman semakin berkurang selama tiga tahun terakhir.

Dengan kata lain bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di kabupaten ini semakin membaik.

Adapun selang waktu tindak kejahatan yang paling lama terjadi di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Pada tahun 2021, selang waktu tindak kejahatan di kabupaten ini lebih dari 42 jam. Dengan kata lain, satu kejahatan dengan kejahatan lainnya baru terjadi setelah selang waktu dua hari. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tindak kejahatan relatif jarang terjadi di kabupaten ini. Selain Gunungkidul, kabupaten yang memiliki selang waktu kejahatan relatif panjang lainnya adalah Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Selang waktu kejahatan di Kulon Progo adalah 17 jam lebih dan di Kota Yogyakarta sebesar 12 jam lebih.

Crime rate atau angka kejahatan menghitung banyaknya kejahatan dibagi jumlah penduduk. Semakin besar angka kejahatan menunjukkan semakin banyaknya kejahatan dibandingkan dengan jumlah penduduk sekaligus merupakan salah satu indikasi semakin tidak amannya suatu wilayah. Pada tahun 2021, angka kejahatan di D.I. Yogyakarta adalah 189, artinya terjadi sebanyak 189 kejahatan per 100.000 penduduk. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa untuk setiap 100.000 penduduk di D.I. Yogyakarta terdapat sebanyak 189 penduduk yang berisiko menjadi korban tindak kejahatan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2020, resiko terkena tindak kejahatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan. Semakin meningkatnya angka *crime rate* menunjukkan bahwa resiko menjadi korban kejahatan semakin meningkat yang berarti bahwa tingkat keamanan di D.I. Yogyakarta semakin memburuk.

Menurut kabupaten/kota, pada tahun 2021, resiko penduduk terkena tindak kejahatan terbesar terdapat di Kota Yogyakarta (184 kejadian kejahatan per 100.000 penduduk), sedangkan Kabupaten Gunungkidul merupakan wilayah dengan resiko menjadi korban tindak kejahatan terendah yaitu sebesar 27 orang per 100.000 penduduk. Dengan demikian, Gunungkidul merupakan daerah yang paling aman dari resiko tindak kejahatan di wilayah D.I. Yogyakarta.

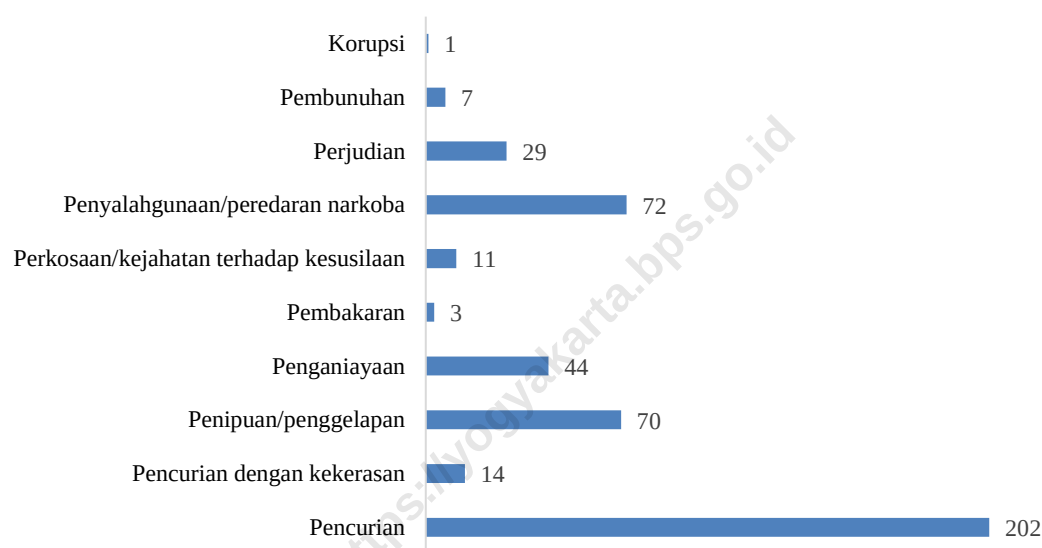
3.3 Jenis-jenis Tindak Kejahatan di D.I. Yogyakarta

Berdasarkan hasil Podes 2021, jenis kejahatan yang paling banyak terjadi di D.I. Yogyakarta adalah kejahatan pencurian yang terjadi di 202 kalurahan dari 438 kalurahan yang ada di provinsi ini. Kejadian terbanyak kedua adalah penyalahgunaan/peredaran narkoba, yang terjadi di 72 kalurahan. Sementara itu, pada peringkat ketiga tindak

kejahatan yang banyak terjadi adalah penipuan/penggelapan yang terjadi di 70 kalurahan. Adapun tindak pidana korupsi terjadi di satu kalurahan pada tahun 2021.

Berdasarkan kabupaten/kota dimana terjadi tindak kejahatan, Sleman merupakan kabupaten dimana tindak kejahatan banyak terjadi. Pada tahun 2021, sebanyak 132 kalurahan melaporkan adanya tindak kejahatan yang terjadi. Selain itu, Kabupaten Bantul juga memiliki jumlah kalurahan yang banyak melaporkan terjadinya tindak kejahatan pada tahun 2021. Sementara itu, di Gunungkidul hanya terdapat 83 kalurahan yang memiliki kejadian kejahatan.

Gambar 3.3 Persentase Desa/kelurahan yang ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di D.I. Yogyakarta, 2021



Sumber: Podes 2021, diolah

Hal lain yang perlu mendapat perhatian di wilayah D.I. Yogyakarta adalah adanya perkelahian massal. Menurut hasil Podes 2021, di D.I.Yogyakarta perkelahian massal terjadi di sembilan kalurahan. Angka perkelahian massal tertinggi terjadi pada jenis perkelahian antar kelompok masyarakat. Kasus tersebut terjadi di enam kalurahan. Peringkat selanjutnya adalah perkelahian kelompok masyarakat antar kalurahan yang terjadi di dua kalurahan. Adapun perkelahian antara pelajar/mahasiswa hanya terjadi di satu kalurahan.

Menurut kabupaten/kota, banyaknya kalurahan yang paling banyak terjadi perkelahian massal adalah di Kabupaten Bantul. Perkelahian antar kelompok masyarakat terjadi di empat kalurahan. Kabupaten Sleman juga mencatatkan kejadian perkelahian masal yang cukup banyak. Di kabupaten ini terdapat dua kalurahan dengan kejadian

perkelahian kelompok masyarakat antar kalurahan dan satu kalurahan terjadi perkelahian antar kelompok masyarakat.

Pada tahun 2021, berdasarkan jenis kejahatan, laporan tindak kejahatan yang paling banyak adalah kejahatan terhadap hak milik/barang yaitu sejumlah 2.416 kejahatan. Pada tahun sebelumnya, tindak kejahatan jenis ini tercatat sebanyak 2.279 kasus. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tindak kejahatan terhadap hak milik/barang. Yang termasuk dalam tindak kejahatan ini adalah pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan/penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, dan penadahan.

Jumlah tindak kejahatan yang juga banyak dilaporkan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2021 adalah kejahatan terkait penipuan, penggelapan, dan korupsi. Jumlah laporan kejahatan ini mencapai 2.217 kasus. Jenis kejahatan ini meliputi penipuan/perbuatan curang, penggelapan, dan korupsi.

Selain itu, tindak kejahatan yang juga banyak dilaporkan adalah kejahatan terkait narkoba. Pada tahun 2021, jumlah laporan terkait tindak kejahatan ini sebanyak 668 kejadian. Relatif tingginya tindak kejahatan narkoba perlu mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut mengingat dampak negatif kejahatan narkoba yang begitu besar, sehingga perlu kewaspadaan dan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah. Selain itu, kejahatan narkoba juga cenderung melibatkan kejahatan lainnya dan bersifat internasional. Terlebih lagi, wilayah D.I. Yogyakarta yang merupakan tujuan wisata dan pendidikan menyebabkan arus lalu lintas manusia dan barang yang cukup tinggi, sehingga rawan bagi perdagangan narkoba.

3.4 Korban Tindak Kejahatan dan Upaya Menjaga Keamanan

Berdasarkan hasil Survei Statistik Politik dan Keamanan, jumlah korban tindak kejahatan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 2.593 orang. Data tersebut berasal dari kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.659 orang berjenis kelamin laki-laki dan 934 orang berjenis kelamin perempuan.

Sementara itu, berdasarkan jenis kejahatan yang dialami, jumlah korban yang terbanyak berasal dari kejahatan terhadap hak milik/barang. Pada tahun 2021, jumlah korban kejahatan jenis ini tercatat sebanyak 1.212 orang. Adapun rinciannya adalah jumlah korban laki-laki sebanyak 788 orang dan jumlah korban perempuan sebanyak 424 orang.

Tindak kejahatan yang terjadi tidak bisa diprediksi sebelumnya. Dalam mencegah terjadinya kejahatan, berbagai cara telah dilakukan oleh warga masyarakat D.I. Yogyakarta. Upaya yang dilakukan diantaranya, membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota hansip/linmas. Berdasarkan data Podes 2021, upaya masyarakat dalam menjaga keamanan yang paling banyak dilakukan adalah mengaktifkan sistem keamanan lingkungan dari inisiatif warga. Hal ini dilakukan oleh 418 kalurahan di D.I. Yogyakarta. Selain itu, upaya yang juga banyak dilakukan adalah membuat aturan pelaporan bagi tamu yang menginap lebih dari 24 jam (405 kalurahan).

<https://yogyakarta.bps.go.id>

BAB 4

GAMBARAN UMUM

POLITIK DI

D.I. YOGYAKARTA

GAMBARAN UMUM POLITIK DI D.I. YOGYAKARTA

4

4.1 Pemilu 2019

Pemilihan umum (pemilu) merupakan alat bagi demokrasi untuk memberdayakan warga masyarakat agar dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Keterlibatan warga tersebut tidak hanya berupa partisipasi minimum dengan menggunakan hak pilihnya tetapi diharapkan dapat terlibat dalam menentukan hasil pemilu beserta segenap konsekuensinya terhadap kebijakan publik. Lebih lanjut, melalui pemilu diharapkan warga juga memiliki kebebasan dalam mengontrol penyelenggaraan kekuasaan.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia praktek penyelenggaraan pemilu merupakan amanah pembukaan UUD 1945. Secara berkala pemilu berlangsung setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat dan perwakilan daerah. Selain itu, sejak tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia juga dilakukan melalui mekanisme pemilu.

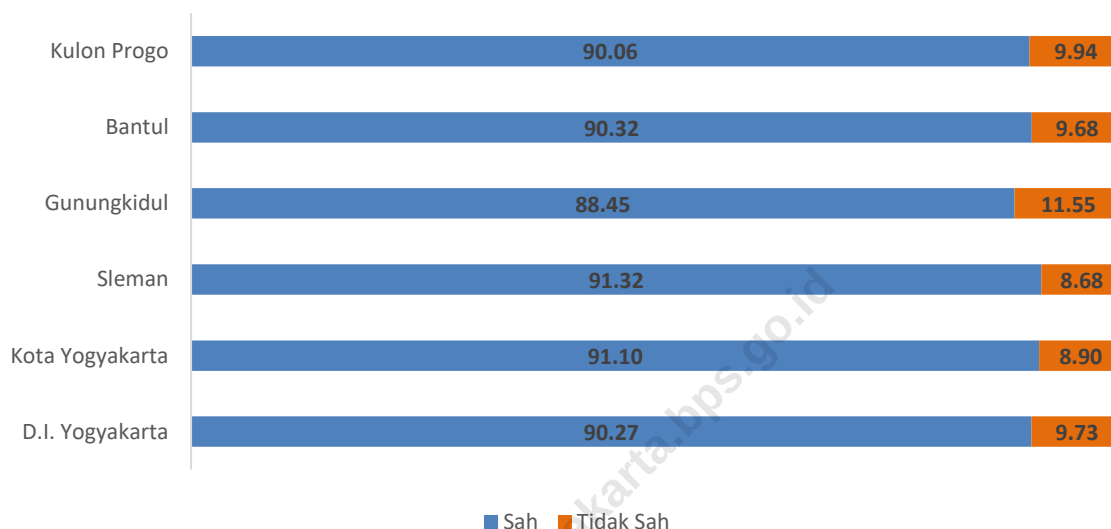
Pada tahun 2019, pemilu digelar secara bersamaan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Dasar hukum penyelenggaraan pemilu 2019 tersebut adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tujuan diselenggarakannya pemilu secara serentak adalah untuk mengurangi biaya terkait dan meminimalkan politik transaksional, di samping meningkatkan jumlah pemilih.

Pada pemilu 2019, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin berhasil keluar sebagai pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden dengan jumlah suara sebanyak 55,50 persen atau 154.257.601. Adapun untuk pemilihan DPR, hasilnya adalah PDI-P menempati urutan pertama dengan perolehan suara 19,33 persen, diikuti oleh Gerindra dengan 12,57 persen. Kemudian Golkar dengan 12,31 persen, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 9,69 persen, Partai Nasdem dengan 9,05 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 8,21 persen.

Pada tahun 2019, jumlah penduduk D.I. Yogyakarta yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu legislatif sebanyak 2.839.017 orang. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 67.053 orang dibandingkan dengan pemilu legislatif tahun 2014. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.412.170 orang (84,96 persen) menggunakan hak pilihnya pada pemilu

serentak yang digelar pada 17 April 2019. Jika dibandingkan dengan pemilu pada tahun 2014, terlihat bahwa partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan sebesar 4,92 poin persen. Peningkatan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya merupakan salah satu indikasi peningkatan kualitas demokrasi di D.I. Yogyakarta.

Gambar 4.1 Persentase Suara Sah dan Tidak Sah dalam Pemilu DPRD Provinsi 2019 Menurut Kabupaten/kota di D.I. Yogyakarta



Sumber: KPU D.I. Yogyakarta

Gambar 4.1 menunjukkan persentase perolehan suara yang masuk untuk DPRD Provinsi menurut Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Secara keseluruhan, pada pemilihan DPRD Provinsi dari 2.412.170 pengguna hak pilih, sebanyak 90,27 persen termasuk dalam kriteria suara sah. Adapun 9,73 persen suara lainnya termasuk dalam suara tidak sah. Menurut kabupaten/kota, untuk pemilihan DPRD Provinsi, persentase suara sah terbanyak terdapat di Sleman dimana jumlah suara sah dari kabupaten ini sebanyak 91,32 persen. Adapun Gunungkidul merupakan kabupaten dengan persentase suara sah yang paling rendah untuk pemilihan DPRD Provinsi, dengan jumlah sebanyak 88,45 persen.

Berdasarkan data KPUD D.I. Yogyakarta, jumlah pengguna hak pilih dalam pemilihan anggota DPR 2019 sebanyak 2.414.361 orang. Dari jumlah tersebut terdapat suara sah sebanyak 90,47 persen dan 9,53 persen suara yang dinyatakan tidak sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota DPD 2019, jumlah pengguna hak pilih tercatat sebanyak 2.414.393 orang. Persentase suara sah untuk pemilihan anggota DPD 2019 sebanyak 90,68 persen dan persentase suara tidak sah sebanyak 9,32 persen. Adapun untuk pemilihan presiden 2019, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.449.679 orang. Persentase

suara sah untuk pemilihan presiden 2019 mencapai 97,88 persen dan suara tidak sah sebanyak 2,22 persen. Terdapat perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk pemilihan legislatif, DPD, dan presiden. Hal tersebut terjadi karena adanya aturan bahwa seseorang yang telah terdaftar sebagai pemilih dari luar wilayah tetap dapat mempunyai hak pilih terutama untuk pemilihan presiden.

4.2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Anggota DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum. Berdasarkan hasil pemilu pada tahun 2019 di D.I. Yogyakarta terdapat sepuluh partai politik yang berhasil meloloskan perwakilannya di DPRD provinsi. Kesepuluh partai politik tersebut berdasarkan urutan perolehan suara di DPRD Provinsi adalah PDIP (17 anggota), Partai Gerindra (7 anggota), PKS (7 anggota), PAN (7 anggota), PKB (6 anggota), Partai Golkar (5 anggota), Partai Nasdem (3 anggota), PPP (1 anggota), Partai Solidaritas Indonesia (1 anggota), dan Partai Demokrat (1 anggota) .

Berdasarkan komposisi menurut jenis kelaminnya, anggota DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta didominasi oleh laki-laki. Jumlah anggota DPRD D.I. Yogyakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa lembaga legislatif ini masih didominasi oleh anggota laki-laki. Jumlah anggota laki-laki sebanyak 46 orang (83,64 persen). Sementara jumlah anggota perempuan sebanyak 9 orang (16,37 persen). Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2014 terlihat adanya peningkatan jumlah perempuan dalam keanggotaan DPRD provinsi tersebut.

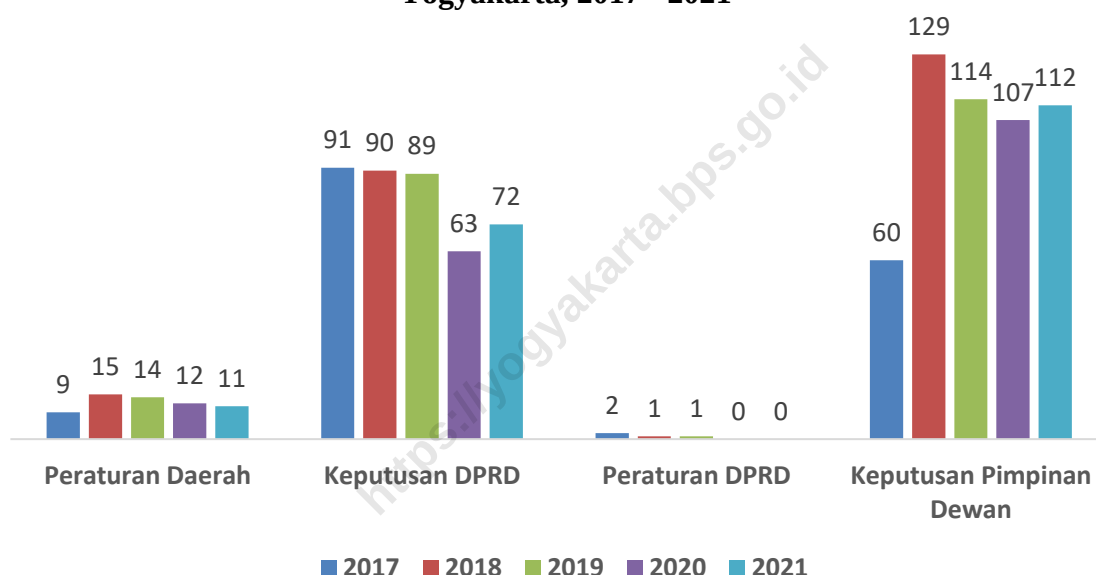
Rendahnya keterlibatan perempuan di lembaga perwakilan rakyat tersebut berbanding terbalik dengan jumlah pengguna hak pilih perempuan yang justru lebih banyak dibandingkan dengan pengguna hak pilih laki-laki (Tabel 24). Rendahnya keterwakilan perempuan di badan legislatif dapat berimplikasi pada terabaikannya isu-isu perempuan dan kebijakan yang bias gender di wilayah ini.

Jumlah partai yang mempunyai kursi di DPRD kabupaten/kota hasil pemilu 2014 sebanyak 10 partai. Dari 10 partai tersebut, partai yang memiliki anggota dewan paling banyak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebanyak 58 orang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) juga merupakan partai yang dominan di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten/kota dengan jumlah anggota DPRD terbanyak di

DI.Yogyakarta berturut-turut adalah Kabupaten Sleman (50 orang), Kabupaten Gunungkidul (45 orang), dan Kabupaten Bantul (45 orang).

Fungsi legislasi tercermin dari jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD. Gambar 4.2 memberikan informasi mengenai produk hukum yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi selama periode 2017 - 2021. Pada tahun 2021, DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta menghasilkan 72 keputusan DPRD dan 112 keputusan pimpinan Dewan. Selain itu, pada tahun yang sama jumlah peraturan daerah (perda) yang sudah disahkan oleh DPRD D.I. Yogyakarta sebanyak 11 perda. Dari 11 perda yang disahkan tersebut, sebanyak 4 perda diantaranya merupakan perda insiatif dari DPRD D.I. Yogyakarta.

Gambar 4.2 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017 - 2021



Sumber: JDIH DPRD D.I. Yogyakarta

4.3 Pemilihan Kepala Daerah

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, mekanisme pemilihan kepala daerah telah berganti sebanyak lima kali. Pertama, sistem penunjukkan atau pengangkatan oleh pusat. Sistem ini sudah digunakan sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda. Kedua, sistem penunjukkan. Ketiga, sistem pemilihan perwakilan dimana pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dan selanjutnya presiden akan menentukan calon kepala daerah terpilih. Keempat, sistem pemilihan perwakilan murni. Dengan sistem ini, kepala daerah murni dipilih oleh DPRD tanpa intervensi dari pemerintah pusat. Dan kelima, pemilihan kepala daerah secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi di Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, secara prosedural kedaulatan politik benar-benar berada di tangan rakyat. Format pilkada secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 21 Januari 2021, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sleman menggelar rapat pleno penetapan Bupati dan Wakil Bupati Sleman hasil pemilu kepala daerah (Pemilukada) 2020. Dalam rapat pleno tersebut ditetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020 yakni Kustini Sri Purnomo-Danang Maharsa.

Pilkada 2020 di Kabupaten Sleman diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati pertama adalah Danang Wicaksana Sulistya - Agus Kholik. Pasangan pertama ini didukung oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pasangan kedua adalah Sri Muslimatun - Amin Purnama yang diusulkan oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya. Adapun pasangan ketiga, Kustini Sri Purnomo - Danang Maharsa yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) dan Partai Amanat Nasional (PAN),

Jumlah pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Sleman tahun 2020 sebanyak 796.926 orang. Adapun jumlah suara sah sebanyak 566.592 suara. Pilkada Sleman dimenangkan oleh pasangan Kustini Sri Purnomo - Danang Maharsa dengan jumlah suara sebanyak 217.921 suara atau 38,46 persen.

Sementara itu, pada tanggal 22 Januari 2021, KPUD Bantul menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 adalah pasangan nomor urut 1 yakni Abdul Halim Muslih-Joko B Purnomo. Pada tanggal yang sama KPUD Gunungkidul menetapkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul di Pilkada 2020 terpilih yakni Sunaryanta-Heri Susanto.

Pelaksanaan pilkada 2020 di Kabupaten Bantul diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan calon yang pertama adalah Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo. Abdul Halim Muslih merupakan petahana Wakil Bupati Bantul yang maju sebagai calon Bupati Bantul berpasangan dengan Joko Purnomo. Pasangan ini diusung dan didukung oleh partai PKB, PDIP, PAN, Demokrat, dan dua partai non legislatif yaitu Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Adapun pasangan kedua, yaitu Suharsono - Totok Sudarto. Suharsono merupakan petahana Bupati Bantul. Pasangan ini diusung oleh lima partai politik, yaitu, Gerindra, Golkar, PPP, PKS dan NasDem.

Jumlah pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Bantul tahun 2020 sebanyak 708.351 orang. Adapun jumlah suara sah sebanyak 533.970 suara. Pilkada Bantul dimenangkan oleh pasangan Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo dengan jumlah suara sebanyak 305.563 suara atau 57,22 persen.

Pilkada 2020 di Kabupaten Gunungkidul diikuti oleh empat pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pasangan pertama adalah Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto yang diusung oleh PAN, Partai Gerindra, PKS, dan Partai Demokrat. Pasangan kedua, Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi diusung oleh Partai NasDem. Pasangan ketiga, Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi diusung oleh PDI Perjuangan. Adapun pasangan keempat, Sunaryanta-Heri Susanto didukung oleh Partai Golkar dan PKB.

Jumlah pemilih terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Gunungkidul tahun 2020 sebanyak 601.981 orang. Adapun jumlah suara sah sebanyak 470.347 suara. Pilkada Gunungkidul dimenangkan oleh pasangan Sunaryanta-Heri Susanto dengan jumlah suara sebanyak 155.878 suara atau 33,14 persen.

Adapun pilkada terakhir di Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Pilkada di kedua kabupaten tersebut diikuti sebanyak 2 pasangan. Pada pilkada Kabupaten Kulon Progo, persentase suara yang sah terhadap jumlah DPT mencapai 77,52 persen. Selain itu, pasangan bupati wakil bupati terpilih di Kulon Progo meraih 85,68 persen suara. Adapun pada pilkada Kota Yogyakarta, persentase suara sah terhadap DPT adalah 66,72 persen. Pasangan walikota-wakil walikota terpilih di Kota Yogyakarta meraih 50,30 persen suara.

4.4. Perkembangan Demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Indek Demokrasi Indonesia (IDI) adalah penilaian terhadap kinerja demokrasi di provinsi yang ada di Indonesia (BPS, 2020). Penilaian tersebut dilakukan baik dari sisi sistem, mekanisme, dan prosedurnya (aspek procedural democracy) maupun persoalan-persoalan yang bersifat substantif seperti kebebasan, keadilan, dan perilaku demokratik atau adab bernegara masyarakat (*substantive democracy*).

Angka IDI pertama kali dirilis pada tahun 2009 dan selanjutnya BPS merilis angka IDI secara rutin setiap tahunnya sampai dengan tahun 2020. Sejalan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, dijumpai beberapa indikator IDI menjadi tidak relevan dan tidak representatif dalam mengukur demokrasi sehingga perlu perbaikan. Selain itu perbaikan juga dilakukan dengan mempertimbangkan saran dan masukan yang diperoleh dari

berbagai kalangan. Pada tahun 2021, penghitungan IDI dengan metode baru mulai dilakukan dan dirilis hasilnya.

Namun demikian, kajian mengenai metode baru penghitungan IDI telah dilakukan sejak tahun 2018 oleh Bappenas. Kajian tersebut merupakan kolaborasi tiga lembaga riset, yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina yang menghasilkan Laporan Akhir: Revisi Indeks Demokrasi Indonesia.

Kajian ini dilaksanakan dalam tiga fase, yaitu; pertama kajian literatur (Mei-Juli 2018), kedua operasionalisasi konsep (Agustus-September 2018), dan terakhir uji coba (September-November 2018). Laporan akhir sendiri disusun hingga akhir 2018. Laporan ini telah secara komprehensif memasukkan segala aspek penting yang dapat menjadi acuan revisi IDI metode baru: perubahan teori, usulan indikator, hingga cara penghitungan. Uji coba pengumpulan data dilakukan pada empat wilayah, yaitu Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku, dan Jakarta (pusat).

Terdapat empat hal yang menjadi pertimbangan bagi urgensi penghitungan IDI dengan menggunakan metode baru; Pertama, IDI perlu memiliki basis teoretik dan konseptual yang kuat dalam memaknai demokrasi sesuai konteks Indonesia. Basis teoretik dan konseptual tersebut diharapkan mampu dioperasionisasikan untuk memberikan arah bagi pembangunan politik dan arah perubahan demokrasi di Indonesia. Untuk itu IDI perlu memiliki ukuran-ukuran kebaikan demokrasi yang dituju sehingga tujuan dan arah perubahan yang diharapkan menjadi jelas dan terukur. IDI tidak hanya sekadar instrumen pengukuran dan penilaian demokrasi Indonesia, tetapi juga harus didorong sebagai acuan untuk perencanaan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Kedua, perlunya melakukan pengukuran di tingkat pusat bukan hanya tingkat provinsi untuk menjamin Indeks Demokrasi Indonesia yang komprehensif. IDI saat ini hanya mengukur unit analisis di tingkat provinsi, sementara hasil skor nasional adalah hasil agregasi dari skor provinsi. Hal ini cukup problematik karena tidak dilakukannya pengumpulan data berbagai indikator tingkat pusat untuk menghasilkan skor di tingkat pusat.

Ketiga, konsep demokrasi dalam IDI saat ini masih dipahami terbatas pada dimensi politik. Sementara konteks demokrasi berdasarkan pengalaman negara-negara pasca-otoritarianisme seperti halnya Indonesia perlu melihat demokrasi dalam berbagai dimensi yang lebih luas termasuk ekonomi dan sosial masyarakat. Ketimpangan akses dan distribusi

sumber daya ekonomi juga merupakan problem demokrasi, begitu pun juga hadir dan bekerjanya kekuatan oligarki dalam sistem politik dan ekonomi di Indonesia adalah hambatan bagi demokrasi karena adanya monopoli dan konsentrasi sumber daya.

Keempat, diperlukan studi perbandingan dengan berbagai indeks dan pengukuran demokrasi yang ada, memetakan berbagai indeks-indeks demokrasi sebagai referensi dan pembanding. Seluruh hal yang menjadi urgensi revisi tersebut telah dirancang pada hasil kajian yang dihasilkan konsorsium lembaga riset tersebut. Oleh karenanya naskah akademik ini akan menggunakan hasil tersebut sebagai rujukan utama, sekaligus fokus untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Kondisi ini merupakan keniscayaan mengingat konsorsium hanya memiliki waktu kurang lebih 7 (tujuh) bulan, dari Mei – Desember 2018 untuk menyelesaikan kajian. Oleh karenanya berbagai hal teknis seperti pemeriksaan ketersediaan data indikator, penyiapan instrumen, serta teknis penghitungan belum dieksplorasi terlalu mendalam.

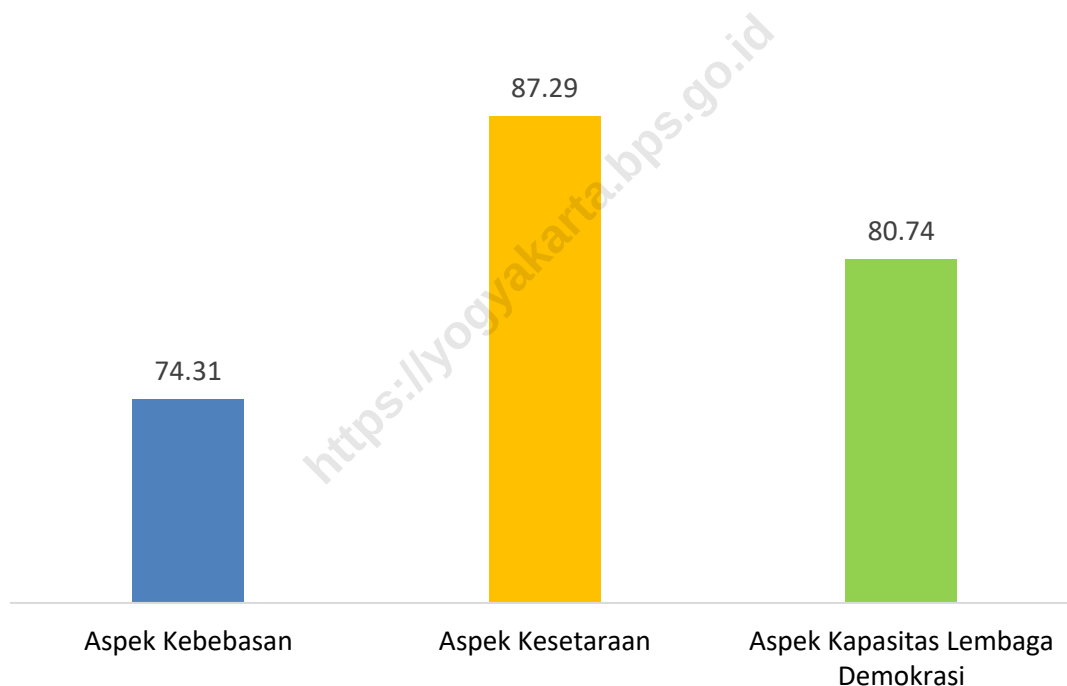
Riset IDI metode baru didasarkan pada konsep demonopolisasi yang mencakup tiga ranah yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Untuk mengukur perkembangan demokrasi maka demonopolisasi dioperasionalkan ke dalam dua aspek yaitu kebebasan (*liberalization*) dan kesetaraan (*equalization*). Dalam perspektif demonopolisasi maka aspek kebebasan diartikan sebagai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian dan otonomi dari kekuatan politik otoriter lama, dan kemudian dapat menetapkan kepentingan mereka sendiri. Sedangkan aspek kesetaraan diartikan sebagai proses sejauh mana kelompok minoritas (yang mengalami diskriminasi dan eksklusif) secara substansial dapat memiliki akses pada sumber daya di berbagai sektor, dan dapat menikmati kesetaraan dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Selain dua aspek tersebut, demonopolisasi juga dilihat dari aspek kapasitas lembaga demokrasi yaitu sejauh mana lembaga-lembaga demokrasi menginternalisasikan secara prosedural dan substantif upaya-upaya yang menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Berdasarkan konsep tersebut, IDI merupakan indikator komposit yang disusun dari tiga aspek, yaitu Aspek Kebebasan, Aspek Kesetaraan, dan Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi. Adapun jumlah indikator demokrasi yang ditawarkan sebanyak 22 indikator, terdiri dari 7 indikator aspek kebebasan, 7 indikator aspek kesetaraan, dan 8 indikator aspek kapasitas lembaga demokrasi. Seluruh indikator tersebut meliputi ranah politik, ekonomi, dan sosial, guna mengukur demonopolisasi di tiga ranah tersebut. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya.

Nilai IDI berada dalam rentang 0 sampai dengan 100, dimana semakin besar nilainya menunjukkan kinerja yang semakin bagus. Nilai 0 sampai dengan 60 berada dalam kriteria “buruk”, nilai diatas 60 sampai dengan 80 berada dalam kriteria “sedang”, dan nilai di atas 80 sampai dengan 100 termasuk dalam kriteria “baik”.

Pada tahun 2021, dengan menggunakan metode baru, angka IDI untuk D.I. Yogyakarta adalah 81,21. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja demokrasi di D.I. Yogyakarta berada dalam kategori “baik”. Dengan demikian, secara umum sistem dan institusi demokrasi di wilayah ini telah berfungsi dengan baik. Capaian ini juga menempatkan D.I. Yogyakarta pada peringkat ketiga capaian IDI dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia pada tahun 2021.

Gambar 4.3. Nilai Aspek IDI Metode Baru Daerah Istimewa Yogyakarta, 2021



Sumber: penghitungan IDI Metode Baru, 2021

Adapun berdasarkan aspek penyusunnya, pada tahun 2021, Aspek Kebebasan bernilai 74,31 (Gambar 4.3). Dengan demikian D.I. Yogyakarta termasuk dalam kriteria “sedang” untuk aspek ini. Aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri.

Sementara itu, pada tahun yang sama, Aspek Kesenjangan bernilai 87,29 atau termasuk dalam kategori “baik”. Nilai aspek ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dua aspek lainnya untuk D.I. Yogyakarta. Aspek kesetaraan mengukur sejauh mana kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi dapat memiliki akses pada sumber

daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan. Sumber daya di sini dapat berupa kebijakan, anggaran, jabatan, pelayanan, respek, dan sebagainya yang intinya memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk berdaya.

Kemudian, nilai Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi adalah 80,74 dan termasuk dalam kategori “baik”. Aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan.

Dari 22 indikator penyusun IDI, sebanyak tiga indikator diantaranya masih berada pada kriteria “buruk”. Hal tersebut mencerminkan masih ditemuinya tantangan dan hambatan dalam praktek demokrasi di wilayah D.I. Yogyakarta yang perlu diselesaikan. Indikator yang paling rendah nilainya adalah Indikator Terjaminnya Kebebasan Berkumpul, Berekspresi, Berserikat, dan Berpendapat antar Masyarakat (nilai 30,00). Rendahnya nilai indikator ini menunjukkan bahwa masih adanya represi atau tekanan dari kelompok masyarakat yang satu terhadap masyarakat lainnya yang menghalangi kebebasan berekspresi maupun berpendapat.

Selanjutnya, Indikator Kinerja Lembaga Legislatif (nilai 55,56) merupakan indikator terendah kedua. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif perlu meningkatkan kinerjanya dalam mengawal praktek demokrasi di D.I. Yogyakarta. Upaya tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memperbanyak jumlah perda inisiatif, memperluas saluran aspirasi masyarakat, dan meningkatkan peran dan fungsi legislatif.

Kemudian, indikator yang juga mencatatkan kinerja “buruk” adalah Indikator Pemenuhan Hak-hak Pekerja (nilai 59,83). Upaya memperbaiki kinerja ini diantara dapat dilakukan dengan cara meningkatkan persentase pekerja yang memiliki jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, dan dana pensiun.

<https://yogyakarta.bps.go.id>

TABEL - TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Penduduk di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota		Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ kelurahan	Jumlah Penduduk
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	586,27	12	88	443 283
02	Bantul	506,85	17	75	998 647
03	Gunungkidul	1 485,36	18	144	758 168
04	Sleman	574,82	17	86	1 136 474
71	Yogyakarta	32,50	14	45	376 324
34	D.I. Yogyakarta	3 185,80	78	438	3 712 896

Sumber: BPS DIY, 2022

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulon Progo	-	1	12	1
02	Bantul	-	1	17	1
03	Gunungkidul	-	1	18	18
04	Sleman	1	1	19	2
71	Yogyakarta	-	1	14	22
Jumlah		1	5	80	44

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022

Tabel 3. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kulon Progo	1 060	66	1 126	1:394
2 Bantul	1 343	128	1 471	1:679
3 Gunungkidul	1 028	65	1 093	1:694
4 Sleman	1 542	112	1 654	1:687
5 Yogyakarta	1 289	75	1 364	1:276
6 MAPOLDA DIY	2 804	176	2 980	n. a
D.I. Yogyakarta	9 066	622	9 688	1:383

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022, diolah

Tabel 4. Jumlah Desa/kelurahan yang Mempunyai Pos Polisi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2018 - 2021

Kabupaten/Kota		2018	2021
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	13	19
02	Bantul	20	27
03	Gunungkidul	29	30
04	Sleman	30	29
71	Yogyakarta	22	29
D.I. Yogyakarta		114	134

Sumber: Podes 2018 - 2021

Tabel 5. Jumlah Hansip dan Rasio Hansip per Desa/kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota		Jumlah Hansip	Rasio Hansip
(1)		(2)	(3)
01	Kulon Progo	3 755	43
02	Bantul	5 222	70
03	Gunungkidul	5 694	40
04	Sleman	5 912	67
71	Yogyakarta	2 766	61
D.I. Yogyakarta		23 349	53

Sumber: Podes 2021

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021

Kabupaten/Kota		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	1 172	533	491
2	Bantul	933	1 088	1 260
3	Gunungkidul	234	184	208
4	Sleman	1 575	1 424	1 374
5	Yogyakarta	739	621	693
6	MAPOLDA DIY	4 599	4 701	2 973
D.I.Yogyakarta		9 252	8 551	6 999

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022

**Tabel 7. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021**

Kabupaten/Kota		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	970	382	357
2	Bantul	721	884	898
3	Gunungkidul	148	149	181
4	Sleman	920	892	858
5	Yogyakarta	547	482	516
6	MAPOLDA DIY	3 059	3 745	2 032
D.I. Yogyakarta		6 365	6 534	4 842

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020 - 2022

Tabel 8. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021

Kabupaten/Kota		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	82,76	71,67	72,71
2	Bantul	77,28	81,25	71,27
3	Gunungkidul	63,25	80,98	87,02
4	Sleman	58,41	62,64	62,45
5	Yogyakarta	74,02	77,62	74,46
6	MAPOLDA DIY	66,51	79,66	68,35
D.I. Yogyakarta		68,80	76,41	69,18

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020 - 2022, diolah

Tabel 9. Selang Waktu Terjadinya Tindak Kejahatan (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021 (jam)

Kabupaten/Kota		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Kulon Progo	7.28'28"	16.26'07"	17.50'28"
2	Bantul	9.23'21"	8.03'05"	6.57'09"
3	Gunungkidul	37.26'09"	47.36'31"	42.06'55"
4	Sleman	5.33'43"	6.09'06"	6.22'32"
5	Yogyakarta	11.51'14"	14.06'23"	12.38'26"
6	MAPOLDA DIY	n.a	n.a	n.a
D.I.Yogyakarta		56'49"	1.01'28"	1.15'06"

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020 - 2022, diolah

Tabel 10. Resiko Penduduk Terkena Tindak Pidana (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2019 - 2021

Kabupaten/Kota		2019	2020	2021
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kulon Progo	272	87	111
02	Bantul	95	89	126
03	Gunungkidul	32	19	27
04	Sleman	129	79	121
71	Yogyakarta	144	129	184
D.I.Yogyakarta		239	102	189

Sumber: Survei Statistik Polkam 2020 - 2022, diolah

Tabel 11. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan per Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Jenis Kejahatan	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pencurian	37	38	54	55	18	202
2. Pencurian dengan kekerasan	0	6	0	6	2	14
3. Penipuan/penggelapan	17	15	11	18	9	70
4. Penganiayaan	8	16	2	15	3	44
5. Pembakaran	0	1	0	2	0	3
6. Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan	2	3	2	4	0	11
7. Penyalahgunaan/peredaran narkoba	15	18	6	25	8	72
8. Perjudian	7	8	7	6	1	29
9. Pembunuhan	4	2	1	0	0	7
10. Korupsi	0	0	0	1	0	1

Sumber: Podes 2021

Tabel 12. Banyaknya Desa/kelurahan yang Ada Perkelahian Massal Menurut Jenis Perkelahian dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021

Jenis Perkelahian	Kabupaten/Kota					D.I. Yogyakarta
	Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Antar kelompok masyarakat	-	4	-	1	1	6
2. Kelompok masyarakat antar Desa/kelurahan	-	-	-	2	-	2
3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	-	-	-	-	-	-
4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	-	-	-	-	-	-
5. Antar pelajar/mahasiswa	1	-	-	-	-	1
6. Antar suku	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	4	-	3	1	9

Sumber: Podes 2021

Tabel 13. Jumlah Laporan Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020 – 2021

No.	Jenis Kejahatan	2020		2021	
		Lapor	Selesai	Lapor	Selesai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kejahatan terhadap Nyawa	6	5	9	8
2.	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	498	431	232	228
3.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	109	50	37	27
4.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	9	5	3	3
5.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	172	136	58	37
6.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	2 279	1 381	1 122	691
7.	Kejahatan terkait Narkotika	1 242	1 164	357	346
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	1 737	1 204	1 154	691
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	10	8	1	1
Jumlah		6 062	4 387	2 973	2 032

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022, diolah

Tabel 14. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan di Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2021

No.	Jenis Tindak Pidana	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembunuhan	6	18
2.	Penganiayaan berat (Anirat)	198	251
3.	Penganiayaan ringan (Anira)	126	92
4.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	172	171
5.	Perkosaan	34	18
6.	Penculikan	9	6
7.	Pencurian dengan kekerasan (Curas)	172	116
8.	Pencurian Biasa (Termasuk Ringan)	900	1 048
9.	Pencurian kendaraan Bermotor (Curanmor)	557	563
10.	Pencurian Dengan Pemberatan (Curat)	703	718
11.	Pengrusakan/Penghancuran Barang	94	56
12.	Pembakaran Dengan Sengaja	8	8
13.	Narkotika dan Psikotropika	1 242	668
14.	Penipuan/Perbuatan Curang	1 140	1 470
15.	Penggelapan	594	655
16.	Korupsi	3	2

Sumber: Survei Statistik Polkam 2021 - 2022, diolah

Tabel 15. Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020 - 2021

Kabupaten/Kota	2020		2021	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 Kulon Progo	302	190	220	54
2 Bantul	562	268	715	333
3 Gunungkidul	n.a	n.a	n.a	n.a
4 Sleman	556	497	507	401
5 Yogyakarta	487	329	217	146
6 MAPOLDA DIY	1 914	1 228	n.a	n.a
D.I. Yogyakarta	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Survei Statistik Polkam 2021 – 2022, diolah

Tabel 16. Jumlah Korban Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan dan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020 – 2021

No.	Jenis Kejahatan	2020*		2021**	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kejahatan terhadap Nyawa	2	4	6	3
2.	Kejahatan terhadap Fisik/Badan	240	301	82	95
3.	Kejahatan terhadap Kesusilaan	3	113	3	38
4.	Kejahatan terhadap Kemerdekaan Orang	4	5	3	0
5.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang dengan Penggunaan Kekerasan	82	71	34	29
6.	Kejahatan terhadap Hak Milik/Barang	1 443	893	788	424
7.	Kejahatan terkait Narkotika	967	452	125	2
8.	Kejahatan terkait Penipuan, Penggelapan, dan Korupsi	1 070	662	613	343
9	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	10	11	5	0
Jumlah		3 821	2 512	1 659	934

Sumber: Survei Statistik Polkam 2021 - 2022, diolah

*) Tidak termasuk Gunungkidul

**) Tidak termasuk Gunungkidul dan Mapolda

Tabel 17. Banyaknya Desa/kelurahan yang Melakukan Upaya Menjaga Keamanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota		Jenis Upaya menjaga Keamanan				
		1	2	3	4	5
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulon Progo	71	61	28	76	78
02	Bantul	59	64	41	68	74
03	Gunungkidul	123	113	39	134	140
04	Sleman	82	79	44	82	82
71	Yogyakarta	40	38	9	45	44
D.I. Yogyakarta		375	355	161	405	418

Sumber: Podes 2021

Keterangan:

1. Membangun Pos Kamling
2. Membentuk regu keamanan lingkungan
3. Menambah jumlah anggota hansip/linmas
4. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke Aparat lingkungan
5. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga

Tabel 18. Jumlah PNS Menurut Eselon dan Jenis Kelamin, 2020

No	Kabupaten/Kota	Eselon II		Eselon III		Eselon IV		Jumlah Seluruh PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01	Kulon Progo	10	2	36	16	102	79	2 521	3 319
02	Bantul	26	3	119	47	249	242	2 814	4 557
03	Gunungkidul	21	5	119	32	289	161	4 005	4 099
04	Sleman	24	6	94	54	293	247	3 024	5 264
71	Yogyakarta	25	4	85	61	297	331	2 015	2 861
34	Pemda D.I. Yogyakarta	28	9	123	90	327	320	5 223	5 335
Jumlah		134	29	576	300	1 557	1 380	19 602	25 435

Sumber: BKD DIY

Tabel 19. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di D.I. Yogyakarta, 2021

No	DPRD	Jumlah Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulon Progo	12	4
02	Bantul	11	4
03	Gunungkidul	11	3
04	Sleman	15	4
05	Yogyakarta	12	3
06	D.I. Yogyakarta	11	4
Jumlah		72	22

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022

Tabel 20. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Menurut Asal Partai Politik dan Jenis Kelamin di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021

No.	Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	13	4	17
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	2	7
3.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7	0	7
4.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	2	7
5.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	6	0	6
6.	Partai Golongan Karya (Golkar))	4	1	5
7.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	3	0	3
8.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	0	1
9.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	1
10.	Partai Demokrat	0	1	1
Jumlah		45	10	55

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022

Keterangan: Hasil Pemilu Legislatif 2019

Tabel 21. Jumlah Anggota DPRD Menurut Partai Politik dan Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta, 2021

No.	Partai Politik	Kabupaten/Kota				
		Kulon Progo	Bantul	Gunung kidul	Sleman	Yogya karta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	1	1	9	3	4
02.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	6	4	6	-
03.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	5	4	4	6	5
04.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	12	11	10	15	13
05.	Partai Golongan Karya (Golkar)	5	5	5	5	4
06.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	6	8	4	6	5
07.	Partai Demokrat	-	2	3	-	2
08.	Partai Amanat Nasional (PAN)	6	5	6	6	6
09.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	-	2	-	3	1
10.	Partai Bulan Bintang (PBB)	-	1	-	-	-
11.	Partai Hati Nurani (Hanura)	-	-	-	-	-
Jumlah		40	45	45	50	40

Sumber : Survei Statistik Polkam 2022

Keterangan : Hasil Pemilu Legislatif 2019

Tabel 22. Jumlah Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2021

Kabupaten/Kota	Anggota DPRD		
	L	P	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1 Kulon Progo	32	8	40
2 Bantul	41	4	45
3 Gunungkidul	34	11	45
4 Sleman	36	14	50
5 Kota Yogyakarta	34	6	40
DPRD Provinsi	45	10	55

Sumber: Survei Statistik Polkam 2022

Tabel 23. Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilih		Jumlah Pengguna Hak Pilih	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kulonprogo	164 656	174 247	141 561	150 487
02 Bantul	358 089	374 717	309 832	327 448
03 Gunungkidul	299 320	314 815	245 522	262 958
04 Sleman	401 170	427 100	340 781	366 639
71 Yogyakarta	154 844	170 059	125 886	141 056
34 D.I.Yogyakarta	1 378 079	1 460 938	1 163 582	1 248 588

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 24. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPRD Provinsi di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pegguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	292 048	263 017	29 031
02	Bantul	637 280	575 572	61 708
03	Gunungkidul	508 480	449 772	58 708
04	Sleman	707 420	646 002	61 418
71	Yogyakarta	266 942	243 183	23 759
34	D.I.Yogyakarta	2 412 170	2 177 546	234 624

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 25. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPR di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pegguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	292 193	257 777	34 416
02	Bantul	637 855	577 497	60 358
03	Gunungkidul	508 657	454 472	54 185
04	Sleman	708 144	648 113	60 031
71	Yogyakarta	267 512	246 496	21 016
34	D.I.Yogyakarta	2 414 361	2 184 355	230 006

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 26. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk DPD di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	292 193	261 537	30 656
02	Bantul	637 872	580 860	57 012
03	Gunungkidul	508 657	450 327	58 330
04	Sleman	708 159	648 440	59 719
71	Yogyakarta	267 512	248 173	19 339
34	D.I.Yogyakarta	2 414 393	2 189 337	225 056

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 27. Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah Menurut Kabupaten/Kota dalam Pemilu Legislatif 2019 untuk Pilpres di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kabupaten/Kota		Jumlah Pengguna Hak Pilih	Perolehan Suara	
			Suara Sah	Suara Tidak Sah
(1)		(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	293 150	285 689	7 461
02	Bantul	644 079	630 570	13 509
03	Gunungkidul	509 495	496 019	13 476
04	Sleman	727 403	714 163	13 240
71	Yogyakarta	275 552	271 214	4 338
34	D.I.Yogyakarta	2 449 679	2 397 655	52 024

Sumber : KPU D.I. Yogyakarta

Tabel 28. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, 2019 - 2021

Wilayah	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Kulon Progo	7	12	12
Bantul	15	10	11
Gunungkidul	15	11	11
Sleman	24	14	15
Yogyakarta	10	12	12
D.I. Yogyakarta	14	12	

Sumber: Survei Statistik Polkam 2019 - 2021, diolah

Tabel 29. Alokasi Anggaran Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2016-2020 (dalam rupiah)

No.	Tahun	Sektor Pendidikan		Sektor Kesehatan	
		Nominal	Persentase Thd Total Anggaran	Nominal	Persentase Thd Total Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2016	1 092 817 284 144	27,50	387 122 289 647	11,42
2.	2017	1 910 798 949 981	36,83	416 329 525 377	10,62
3.	2018*	1 327 372 081 501	15,30	178 488 693 986	3,18
4.	2019	1 907 895 758 547	31,91	188 957 215 610	3,16
5.	2020	1 861 001 493 301	31,73	806 790 886 598	13,75

Sumber: DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta

*) hasil penghitungan koding dokumen IDI 2018

Tabel 30. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017-2021

Tahun	Peraturan Daerah	Keputusan DPRD	Peraturan DPRD	Keputusan Pimpinan Dewan	Kesepakatan Bersama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2017	9	91	2	60	11	173
2018	15	90	1	129	-	231
2019	14	89	1	114	-	218
2020	12	63	0	107	-	182
2021	11	72	0	112	-	195

Sumber: JDIH DPRD D.I. Yogyakarta

Tabel 31. Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Terakhir di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Kulonprogo	15 Februari 2017	2
02	Bantul	9 Desember 2020	2
03	Gunungkidul	9 Desember 2020	4
04	Sleman	9 Desember 2020	3
71	Kota Yogyakarta	15 Februari 2017	2

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 32. Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

No	Kabupaten/Kota	Terdaftar di DPT	Suara Sah	Persentase Suara Sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	332 211	257 517	77,52
02	Bantul	708 351	533 970	75,38
03	Gunungkidul	601 981	470 347	78,13
04	Sleman	796 926	566 592	71,10
71	Kota Yogyakarta	298 989	199.475	66,72

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

Tabel 33. Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Partai Pendukung
		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Kulonprogo	220 643	85,68	PDI-P, PAN, Golkar, PKS, Nasdem, dan Hanura
02	Bantul	305 563	57,22	PKB, PDI-P, PAN, Demokrat, dan PBB
03	Gunungkidul	155 878	33,14	Golkar dan PKB
04	Sleman	217 921	38,46	PDI-P dan PAN
71	Kota Yogyakarta	100 332	50,30	Golkar, PAN, PKS, Demokrat, dan Gerindra

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D I Yogyakarta

Tabel 34. Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Hasil Pilkada Terakhir Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan, Usia dan Jabatan Sebelumnya di D.I. Yogyakarta

Kode	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Usia Saat Terpilih	Jabatan/Pekerjaan Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Kulonprogo*	Laki-laki	S-1	65	Wakil Bupati
02	Bantul	Laki-laki	MA	50	Wakil Bupati
03	Gunungkidul	Laki-laki	D-3	50	Anggota TNI-AD
04	Sleman	Perempuan	S-1	60	Ketua Dekranasda Sleman
71	Kota Yogyakarta	Laki-laki	S-1	53	Bupati

Sumber: KPU Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta

*Penggantian bupati, karena bupati terpilih menjadi kepala BKKBN

Tabel 35. Indeks Demokrasi Indonesia D.I. Yogyakarta (Metode Baru), 2021

Nomor	Indeks/Aspek/Indikator	2021
	Indeks Demokrasi Indonesia	81,21
	Kebebasan	74,31
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	79,00
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	30,00
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	88,33
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	100,00
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	70,39
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	59,83
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	77,75
	Kesetaraan	87,29
8	Kesetaraan gender	100,00
9	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan	100,00
10	Anti monopoli sumber daya ekonomi	73,17
11	Akses warga miskin pada perlindungan dan jaminan sosial	91,09
12	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah	95,44
13	Akses masyarakat terhadap informasi publik	74,39
14	Kesetaraan dalam pelayanan dasar	84,03

Tabel 35.

Nomor	Aspek/Indikator	2021
	Kapasitas Lembaga Demokrasi	80,74
15	Kinerja lembaga legislatif	55,56
16	Kinerja lembaga yudikatif	86,94
17	Netralitas penyelenggara pemilu	75,00
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	66,67
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	65,66
20	Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/APBD oleh pemerintah	100,00
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	91,60
22	Pendidikan politik pada kader partai politik	94,00

Sumber: Hasil Penghitungan IDI 2021

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Lingkar Selatan Tamantirto Kasihan Bantul Yogyakarta 55183
Telp. (0274) 4342234 (Hunting) Fax. 4342230
Email : bps3400@mailhost.bps.go.id Website: <http://yogyakarta.bps.go.id>